



KIPRAH BUPATI BROTODININGRAT DALAM POLITIK LOKAL DI KARISIDENAN MADIUN (1869-1900)

¹Alip Sugianto, ²Khoirurosyidin

¹Manajemen, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia, sugiantoalip@gmail.com

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia, rosyidin.kh@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 23-10-2021

Disetujui: 29-12-2021

Kata Kunci:

Kiprah

Bupati

Brotodiningrat

Politik

Keywords:

Gait

Regent

Brotodiningrat

Political

ABSTRAK

Abstrak: Artikel ini membahas tentang kiprah Bupati Brotodiningrat di Karisidenan Madiun. Metodologi yang digunakan melalui empat tahapan yaitu huristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasilnya adalah Bupati Brotodiningrat menjabat bupati pada usia 21 tahun dengan menjadi Bupati Sumoroto, dan pada usia 27 menjadi bupati Ngawi. Selama menjadi Bupati Ngawi beliau memprakarsai berdirinya Masjid Agung, setelah itu dipindah menjadi Bupati Madiun yang ke 23. Selama menjadi Bupati Madiun terjadi konflik dengan residen Madiun, beliau selalu menolak tunduk terhadap kepentingan belanda sehingga seringkali terjadi konflik yang disematkan kepada beliau. Permasalahan tersebut pertama terkait kebijakan kolonial terhadap petani yang dianggap merugikan pribumi yang ditentang oleh Bupati, kedua kekacauan di Madiun yang dilakukan oleh para jagoan membuat pemerintah belanda kewalahan, ketiga kasus pencurian di rumah residen belanda yang mengakibatkan Brotodiningrat diasingkan di Padang. Pada Akhirnya sang Bupati divonis tidak bersalah, Pada akhirnya setiap kebenaran akan menentukan jalan.

Abstract: This article discusses the work of the Regent of Brotodiningrat in Karisidenan Madiun. The methodology used goes through four stages, namely huristic, critique, interpretation, and historiography. The result was that the Regent of Brotodiningrat became regent at the age of 21 by becoming the Regent of Sumoroto, and at the age of 27 he became the regent of Ngawi. During his tenure as Regent of Ngawi, he initiated the establishment of the Great Mosque, after which he was moved to become the 23rd Regent of Madiun. During his tenure as Regent of Madiun, there was a conflict with the resident of Madiun, he always refused to submit to Dutch interests so that conflicts often occurred which were pinned to him. The first problem was related to colonial policies against farmers who were considered detrimental to the natives which was opposed by the Regent, the second was the chaos in Madiun carried out by the heroes that overwhelmed the Dutch government, and the third was the case of theft in a Dutch resident's house which resulted in Brotodiningrat being exiled in Padang. In the end the Regent was found not guilty. In the end, every truth will determine the way.



<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.7266>

SA license



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan atau kemuduran suatu daerah tidak terlepas dari pemimpin. Pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap capaian kinerja dan prestasi suatu daerah dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan agar berdaulat dan bermartabat. Banyak ragam dan godaan baik dari dalam maupun luar yang mempengaruhi pemimpin agar integritas menjadi tergadaikan hanya untuk kepentingan sesat dan sesaat. Integritas seorang pemimpin mutlak

dibutuhkan untuk kemajuan dalam level kepemimpinan apapun. Salah satu level kepemimpinan di Pemerintahan adalah jabatan sebagai seorang Bupati di sebuah kabupaten, hirarki ini dahulu dipimpin oleh Adipati disebuah Kadipaten.

Kedudukan Bupati atau Adipati pada aman pemerintahan hindia Belanda mengalami perubahan yang mulai diberlakukan sejak Daendles menjadi Gubernur Jenderal tahun 1808-1811. Perubahan tersebut yakni, sebagai pegawai Hindia Belanda yang diangkat oleh Gubernur Jenderal yang ditandai dengan diberikannya gaji berupa uang, hal ini

dilatarbelakangi oleh keinginan pihak kolonial untuk menegakkan kekuasaannya di tanah jajahan melalui pemerintahan secara langsung (*direct rule*). Tetapi karena kuatnya tatanan pemerintahan tradisional dengan bupati sebagai pemimpin kharismatik yang di mata rakyatnya, maka uya Hindia Belanda tersebut sebenarnya tidak pernah berhasil secara utuh, bahkan akhirnya gagal. Karena itu peran dan posisi Bupati pada saat ini mengalami dualisme, pemimpin yang legal-rasional (pegawai kolonial) dan tradisional kharismatik (Rahmat et al., 2017).

Situasi demikian pihak Kolonial berusaha dengan berbagai cara untuk mengurangi kekuasaan dan pengaruh para Adipati dengan berbagai cara, baik itu intervensi terhadap pemerintahan secara formal melalui kebijakan, maupun dengan cara nonformal dengan mendegradasi kepemimpinan bupati dalam sektor non formal. Tujuannya adalah untuk menghapus jabatan yang diwariskan kemudian melakukan reorganisasi wilayah, kemudian menghadirkan jabatan patih, kontroler dan lain sebagainya. Meskipun demikian kekuasaan Bupati terhadap daerah yang dipimpinnya tetaplah besar, karena rakyat tunduk dan patuh terhadap bupati sebagai pemimpin tradisional yang berakar pada struktur sosial yang tersusun berdasarkan keturunan, kekayaan dan status sosial (Yulifar, 2014).

Peran bupati yang mengalami dualisme juga terdapat di berbagai Kabupaten di Nusantara, salah satunya adalah Sumoroto yang dipimpin oleh Bupati Brotodiningrat. Bupati ini pernah menjabat di tiga wilayah kabupaten di karisidenan Madiun yaitu Kabupaten Sumoroto, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun. Bupati yang disegani masyarakat karena keberanian dan kebijaksanaan. Artikel ini mengkaji tentang sosok bupati karismatik ini tentang bagaimanakan peran dan rekam jeaknya selama menjadi bupati di tiga wilayah Kabupaten tersebut.

Sementara itu, beberapa penelitian terkait yang membahas Bupati Brotodiningrat anatara lain sebagai berikut. Pertama, Buku karya Ong Hok Kam yang merupakan hasil gubahan dari Disertasinya pada tahun 1975 yang berjudul Madiun dalam Kemelut Sejarah Priyayi dan Petani di Karisidenan Madiun Abad XIX. Dalam buku tersebut terdapat salah satu sub bab yang membahas bupati Brotodiningrat.

Kedua, Babad Ponorogo karya Poerwowijoyo tahun 1984. Dalam buku ini dijelaskan tentang sejarah Kabupaten Sumoroto beserta bupati yang pernah memimpin, kabupaten ini dahulu banyak ditumbuhi tanaman Sambiroto pada saat Paku Buwana II ke Ponorogo sehingga daerah ini kemudian dikenal dengan Sumoroto. Ketiga, artikel Jurnal dengan judul Skandal Donner (1900-1902) Sebuah Gerakan Politik Arsip karya Dharwis Widya Utama Jacob tanpa tahun yang mengkaji mengenai skandal Donner yang terlibat dalam peristiwa penurunan jabatan Bupati Madiun Raden Brotodiningrat yang menimbulkan kegemparan di seputar pemerintahan di Jawa, tetapi juga Pemerintah Hindia Belanda.

Keempat, buku yang berjudul Situs Astana Gunung Srandil di Desa Srandil Kecamatan Jambon Ponorogo yang salah satunya membahas makam Brotodiningrat. Dalam buku ini menjelaskan anak keturunan serta silsilah raden Brotodiningrat.

Kelima, buku yang berjudul Sejarah Kabupaten Ponorogo karya Nur Ali Sidi pada tahun 2019 yang mengkaji salah satunya mengenai Perlawanan Raden Tumenggung Brotodiningrat melawan Penjajahan Belanda. Artikel ini melengkapi dari berbagai tulisan di atas, mencoba merekam jejak perjalanan serta peran Raden Brotodiningrat dalam Politik Lokal di Karisidenan Madiun.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap yang pertama heuristik dengan mencari sumber mengenai informasi, data maupun jejak jaman dahulu. Tahapan kedua dengan kritik yaitu dengan memilih dan memilih, memilih dengan mencari data sebanyak-banyaknya dan memilih dengan mencari data yang kredibel. Pada tahap ini peneliti melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber yang didapat untuk kebenaran sumber. Ada dua hal yang perlu dilakukan pertama meneliti otentitas sumber atau keaslian sumber disebut kritik eksternal. Kedua meneliti kredibilitas sumber yang disebut kritik internal (Kuntowijoyo, 2005). Tahapan ketiga dengan interpretasi yaitu tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Herlina (2020) tahapan keempat adalah historiografi

yang didefinisikan sebagai pengkajian tentang penulisan sejarah, atau menurut Gottschalk historiografi diartikan sebagai rekonstruksi imajinasif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Raden Tumenggung Bratadiningrat merupakan Putra dari Raden Mas Bratadirdja Bupati ke III Sumoroto dari Ibu Raden Ayu Sindusena. Secara geneologis RT Bratadiningrat mengalir darah bangsawan keturunan Raja-raja Madura terutama dari pihak Ibu yakni keturunan Sultan Bangkalan I. Sultan Bangkalan I memiliki anak yang bernama Raden Ayu Andjasmani yang menjadi permaisuri dari Sunan Paku Buwana IV Raja Kasultanan Surakarta Hadiningrat yang kemudian menurunkan Sunan Paku Buwana V. Sunan Paku Buwana V memiliki putra bernama Pangeran Sindusen. Pangeran Sindusen memiliki putri Raden Ayu Sindusen yang menjadi Istri Raden Mas Bratadirdja Bupati Sumoroto III yang kemudian menurunkan Raden Mas Bratadiningrat (Poerwawijaya, 1984).

Raden Tumenggung Bratadiningrat lahir di Sumoroto pada hari Selasa Wage tanggal 30 Mei 1849 dia sejak kecil tepatnya usia 6 tahun sudah menjadi anak yatim karena ayahnya meninggal dunia pada tahun 1855 karena sakit. Maka pemerintahan Kabupaten yang seharusnya diemban oleh Raden Mas Bratadiningrat, Maka pemerintahan Kabupaten Sumoroto untuk sementara waktu digantikan oleh Patihnya yang bernama Raden Mas Sumoatmadja. Roda pemerintahan secara *defacto* dijalankan oleh Raden Mas Sumoatmadja untuk menjaga kestabilan pemerintah tetapi secara *de jure* yang menjadi Bupati RM Bratadiningrat (Sugianto, 2020).

Sebagai putra mahkota yang masih belia Raden Mas Bratadiningrat dididik oleh keluarga dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Jiwa patriotisme ditanamkan sejak kecil sehingga kelak ketika dewasa menjadi pribadi yang cinta tanah air sebagaimana ayah dan kakeknya. Ia baru memegang kendali pemerintah dan menjadi Bupati Sumoroto ke IV secara penuh pada usia 21 tahun atau pada tahun 1869. Kendali pemerintah yang sementara waktu dipimpin oleh Patih Sumoatmadja diberikan kepada

RM Bratadiningrat. Pada usia yang relatif muda dalam memimpin sebuah kabupaten ia sudah terkenal sebagai Bupati yang memberani membela rakyat dari penjajahan Belanda. Namun secara politis masih lemah terhadap tekanan-tekanan Belanda (Sugianto, 2020).

Sehingga pada tahun 1877 pihak Belanda menggabungkan Kabupaten Sumoroto dengan Kabupaten Ponorogo Kota Tengah atau yang sekarang ini menjadi satu bagian sehingga kepemimpinan RM Bratadiningrat hanya berselang selama 6 tahun. Penggabungan dua kabupaten tersebut agar tidak terjadi gejolak di masyarakat maupun pemerintahan Sumoroto maka RM Bratadiningrat dipindah tugaskan menjadi Bupati Ngawi ke 6.

Bupati Bratadiningrat menjadi Bupati Ngawi mulai tanggal 10 Mei 1877 sampai dengan 28 Agustus 1885.¹ Semasa menjadi bupati Ngawi, RM Bratadiningrat memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai *religi* di masyarakat, beliau memprakasai berdirinya Masjid *gedhe* atau Masjid Agung Baiturahman yang terletak di sebelah barat alun-alun Ngawi. Masjid Agung Baiturahman didirikan pada hari Selasa Kliwon tanggal 25 November 1879 M atau tanggal 10 Besar tahun Be atau tanggal 10 Dulhijjah 1296 H. Hal tersebut merujuk pada prasasti yang terukir dalam bahasa Arab pada papan kayu jati yang tebal berukuran panjang 238 cm dan lebar 60 m, terletak di atas pintu masuk dari ruang serambi ke ruang induk menghadap ke barat yang berbahasa Arab yang berbunyi "*Wakaana Qiyaamuhu Masjidu fii yaumi tsalaatsa kaliwan syahrul-hajji hilal 10 sanatul baak*". Sementara itu yang berbahasa Jawa berbunyi "*Ingang Yasa Masjid Kanjeng Bratadiningrat*".

Selain itu terdapat pula prasasti lain yang terukir pada logam tembaga pada bagian mustaka (puncak atap bangunan induk) berbahasa Arab dan Jawa yang berbunyi "*Pangeta munggahe mustaka dinten jumuah wanci jam 4 sonten tanggal 1 Syawal tahun Jumakhir 1298 utawi kaping 26 Agustus 1881. Ingang Yasa Mustaka Kanjeng Bratadiningrat. Urunan saking parandawa (?) 1421 kirang (?) saking 155*" dan terdapat pula dalam prasasti yang terdapat di atas lengkung gawang masuk ke mimbar yang

¹ Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie. Batavia, tahun 1878 hlm 203 dan tahun 1886, hlm 23.

berukir berbahasa Arab dan menghadap ke timur yang berbunyi “*Pangetawit pandalemipun mimbar setu pon tanggal 7 Jumadil Awal 1810*” (Peningkat pembuatan mimbar Sabtu Pon tanggal 7 Jumadil Awal 1810 atau bertepatan dengan tanggal 16 April 1881 Masehi atau tanggal 16 Jumadil Awal 1298 Hijriyah. Pada bagian Mimbar di bagian belakang menghadap ke barat di belakang tempat duduk, juga terdapat tulisan ukiran prasasti dengan huruf Arab berbahasa Jawa. “*Penget pembabaripun mimbar nalika dinten Setu Pahing tanggal 18 wulan Romadhon tahun Jimakhir 1298-kaping 12/13 Agustus 1881*” (Peningkatan penyelesaian pembuatan mimbar pada hari Sabtu Pahing tanggal 18 bulan Ramadhan tahun Jimakhir 1298 tanggal 12/13 Agustus 1881). Atau secara lengkapnya berdasarkan pencocokan kalender, 13 Agustus 1881 Masehi; 17 Ramadhan 1298; 18 Pasa 1810 Jimakhir (Baiturohman, 1993).

Pembangunan Masjid Agung tersebut, menunjukkan bahwa Raden Brotodiningrat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nilai spiritual kepada masyarakat. Mengingat masjid merupakan bagian sentral bagi ummat Islam dalam meningkatkan hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan sesama manusia lainnya. Pembangunan masjid agung juga sebagai bentuk simbol dari dakwah Islam bagi masyarakat tempat untuk Shalat maupun aktivitas lain seperti belajar al Qu’an, simbol dari persatuan umat Islam tanpa membedakan status sosial ekonomi, maupun ras.

Setelah menjabat sebagai Bupati Ngawi selama delapan tahun, beliau dipindah tugaskan menjadi Madiun yang ke 23 dan menjabat mulai tahun 1885 sampai tahun 1900. Pada masa pemerintahan Brotodiningrat sangat *santer* ketika terjadi konflik dengan J.J Donner Residen Madiun, dalam sistem pemerintahan berada di bawah gubernur dan memiliki bawahan yaitu asisten residen dan *regent* atau bupati. Asisten residen dijabat oleh kalangan Eropa dan Belanda sementara *regent* atau bupati dijabat oleh kalangan pribumi. Konflik tersebut disebabkan oleh tiga hal yaitu pertama, terjadinya konflik antara petani Madiun dengan pengusaha Eropa dan Belanda. Kedua, merajalelanya para jagoan di berbagai desa di Madiun dan ketiga peristiwa pencurian di rumah residen J.J Donner pada tanggal 6 Oktober 1899.

Permasalahan pertama, diawali dengan adanya penanaman modal asing di Madiun maka banyak tanah milik petani yang disewa secara paksa oleh Belanda untuk kepentingan pendirian pabrik dan usaha perkebunan. Di satu sisi rakyat memperoleh sewa yang sangat murah, disisi lain kehidupan rakyat mulai terancam dikarenakan pengairan sawah milik rakyat mulai dirampas untuk mengairi perkebunan dan pabrik milik asing, sehingga seringkali terjadi bentrok. Sementara itu, bagi petani yang tidak mau menyewakan tanahnya dianggap sebagai pembangkang. Kebijakan semena-mena ini dilakukan oleh *Administrature* Pabrik Gula Kanigoro yang tidak lain adalah adik ipar dari tuan Dooner Residen Belanda, merasa memiliki saudara pejabat maka ia berperilaku arogan, merasa berkuasa dan kejam.

Kebijakan tersebut mengakibatkan petani menjadi rugi karena harus menyewakan sawah dan tidak bisa menanam padi. Selain itu sistem pengairan sawah menjadi kacau. Petani sering dirugikan karena pengairan sawah selalu tidak cukup sehingga sering menjadi perselisihan antara petani dan mandor. Permasalahan ini seringkali ditingkat pengadilan petani selalu kalah. Melihat kondisi demikian Bupati Brotodiningrat turun tangan dengan mengirim permasalahan ini ke Jakarta pada tingkat Jakarta tidak dapat memutuskan, maka di kirim ke Belanda. Keberpihakan Brotodiningrat menunjukkan bahwa selama menjadi bupati Madiun Brotodiningrat sangat memperhatikan kesejahteraan petani.

Permasalahan kedua, menurut Residen Madiun J.J Donner kekacauan di Madiun karena ulah “para jagoan” (warok) yang di masa itu merajalela di berbagai desa di Madiun. J.J Donner mengatakan bahwa dalam era 1900-an jumlah jagoan mencapai 4000 orang, jumlah itu jauh lebih besar dari jumlah aparat pemerintah dan jumlah polisi yang ada di karisidenan Madiun. J.J Donner menganggap keadaan buruk ini karena kelalaian pejabat pamong praja setempat termasuk Brotodiningrat. Tuduhan residen Belanda tersebut dibantah oleh Brotodiningrat, menurut beliau fenomena para jagoan merupakan tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Kemudian bupati Brotodiningrat mengusulkan agar para jagoan direkrut untuk masuk barisan polisi di wilayah kekuasaannya. Namun

usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Donner (Sidi, 2019).

Tidak selesai dengan berbagai permasalahan di atas, kasus demi kasus terus disematkan kepada Brotodiningrat agar sang bupati mundur dari jabatannya, karena kebijakan Brotodiningrat selama menjadi bupati tidak bisa diajak kompromi dengan pihak Belanda, maka selama itu pula J.J. Donner berusaha untuk mendelegitiasi kekuasaan dengan berbagai kasus yang terkesan mengada-ada. Kasus ketiga, yang berusaha disematkan kepada sang bupati adalah mengenai masalah pribadi dengan J.J. Donner ketika ia bangun tidur merasa kaget karena barang-barang di rumah residen hilang tanpa bekas berupa meja, taplak, gelas vas bunga dan benda lainnya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Oktober 1899, komplotan maling pada malam hari berhasil menggasak isi rumah sang residen. Ada salah satu barang istimewa milik tuan Donner yang hilang yakni gorden di ruang tempat ia bersama keluarga sarapan pagi, hilangnya gorden itu membuat Donner murka.

Tuan Donner yang saat itu berada di puncak karier sebagai residen Madiun pencurian di rumahnya merupakan bukan tindakan kriminal biasa, melainkan ada motif politik lain dibalik peristiwa itu, dengan tujuan meruntuhkan wibawa dan mempermalukan pejabat kolonial tertinggi di karisidenan Madiun. Dengan kata lain, tindakan itu sebagai subversi. J.J. Donner mencurigai dan menuduh bawahan langsungnya Bupati Madiun Brotodiningrat sebagai dalang peristiwa pencurian dan tindakan kriminal melawan pemerintahan kolonial Belanda. Atas tuduhan itu Brotodiningrat sangat marah, beliau kemudian berinisiatif melakukan investigasi dengan mengerahkan *weri (intelegent)* untuk menari siapa pelaku pencurian di kediaman residen sehingga membuat ia tertuduh dan terancam memperoleh masalah besar. Selang berapa hari kemudian sang pencuri ditemukan dan dibawa ke residen, namun J.J. Donner kecurigaannya berlebihan sehingga menutup akal sehat, membuat ia menuduh sebagai dalang dibalik peristiwa pencurian.

Brotodiningrat merasa tidak bersalah dan tidak tinggal diam, kemudian membawa kasus tersebut ke ranah hukum dengan membawa kasus ini ke pengadilan dengan meywewa seorang pengacara.

Berdasarkan catatan Kolonial, Brotodiningrat adalah orang pertama pegawai pribumi yang menggunakan jasa pengacara dalam perkara dengan pejabat Eropa dan bekerjasama dengan wartawan untuk membuat opini publik di surat kabar. Namun sayangnya keputusan pengadilan menganggap Brotodiningrat bersalah atas peristiwa itu dan dibuang ke Padang. Yacob (2014) Brotodiningrat dianggap benar benar menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pemerintahan kolonial sehingga harus diasingkan.

Seorang jurnalis, Tirto Adhi Soerjo mengungkap terjadi ketidakadilan dalam peristiwa pencopotan Brotodiningrat sebagai bupati Madiun, kemudian Tirto Adhi Soerjo memberikan saran kepada pemerintah kolonial untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Atas saran Tirto Adhi Soerjo, pada akhirnya pemerintah kolonial memerintahkan penasihat urusan pribumi C. Snouck Hurgronje untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan J.J. Donner pada Gubernur Jenderal. C. Snouck Hurgronje dalam suratnya pada tanggal 29 Desember 1902 kepada Gubernur Jenderal William Roderboom mendapatkan kesimpulan bahwa tuduhan J.J. Donner pada Brotodiningrat adalah salah. Brotodiningrat dianggap sebagai korban salah tafsir. Berdasarkan surat Snouck tersebut, kemudian pemerintah kolonial mengembalikan Brotodiningrat dengan status pensiun. Dengan hormat dengan memperoleh uang pensiun sebesar f 250 per bulan. (Kam, 2018) serta diberitahu secara lisan agar Brotodiningrat agar tidak tinggal di Madiun sementara itu J.J. Donner juga dipensiunkan, karena ia tampak lelah dan hampir gila.

Menurut (Kam, 2018; Sidi, 2019) setelah tidak menjabat sebagai Bupati, Brotodiningrat menghabiskan masa tua di Yogyakarta, namun versi lain tinggal di Ngawi dikediaman awal ketika beliau menjabat sebagai bupati Ngawi sampai meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1927. Bupati RM Brotodiningrat meninggalkan empat istri yakni istri pertama Ray Purwadi dengan 6 anak yang bernama Sindudiningrat, Ray Purwadipradja, Ray Supratiyah, Ray Wignyadipraja, RM Iskandar, RM Ismangil. Istri kedua bernama Sringhadi putri dengan 5 anak yaitu Tirtakusuma, RM Darsasuganda, RM Sindu Saputra, RM Sindudirja, Ray Sutajiah. Istri ketiga bernama Ageng Putri Pakualaman memiliki 4 anak yaitu RM Emawan Bratakusuma, RM Haryasa, RM

Suraja, Ray Surat Bekat dan Istri terakhir Ray Sasmita tidak memiliki anak (Priono, 2016).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kiprah perjalanan Bupati Brotodiningrat di Karisidenan Madiun menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat secara luas, lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri. Perjalanan menjadi seorang Bupati diawali pada usia belia 21 tahun dengan menjadi Bupati Sumoroto kemudian Bupati Ngawi dan terakhir menjadi Bupati Madiun selama menjadi bupati Madiun sering terjadi konflik dengan residen Belanda J.J Donner karena tidak patuh terhadap kebijakan residen. Brotodiningrat dianggap bupati yang “membanggang” susah dikendalikan dan ditaklukan sehingga berbagai kasus yang terkesan direkayasa disematkan kepadanya. Namun berbagai kasus tersebut Brotodiningrat mampu mengatasi dan keluar dari permasalahan karena beliau bepegang kepada prinsip kebenaran. Mengkaji Brotodiningrat sangat menarik, tidak hanya dari faktor sejarah saja namun juga beberapa aspek lainnya seperti ilmu politik dan lainnya, masih banyak ruang bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji kiprah Brotodiningrat dari aspek kebijakan-kebijakan dalam pembangunan yang bisa dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya sehingga memberikan gambaran yang global mengenai Brotodiningrat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada para peneliti terdahulusehingga melengkapi berbagai informasi mengenai sosok Brotodiningrat, semoga menjadi amal jariyah para penulis terdahulu.

REFERENSI

- Baiturohman, T. M. (1993). *Sejarah Singkat Masjid Agung Baiturohman Ngawi*. Pusaka Jawatimur. Retrieved from Pusaka Jawatimur.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020*. Bandung: Satya Hsitorika.
- Kam, O. H. (2018). *Madiun dalam Kemelut Sejarah Priyayi dan Petani di Karisidenan Madiun Abad XIX*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka.
- Poerwawijaya. (1984). *Babad Ponorogo*. Depdikbudpar.
- Priono, D. (2016). *Situs Astana Gunung Srandil Desa*

Srandil Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Ponorogo.

- Rahmat, A. A., Lubis, N. H., & Nugrahanto, W. (2017). Peranan Bupati RAA Wiratanuningrat dalam Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 1908-1937. *Patanjala*, 9(3), 291878.
- Sidi, N. A. (2019). *Sejarah Kabupaten Ponorog*. MGMP Ponorogo.
- Sugianto, A. (2020). *SEJARAH Adipati dan Bupati Ponorogo (1496-2016)*. Unmuh Ponorogo Press.
- Yacob, D. W. U. (2014). SKANDAL DONNER (1900-1902): SEBUAH GERAKAN POLITIK ARSIP. *Jurnal Kearsipan*, 9(1), 79-98.
- Yulifar, L. (2014). *Kabupaten Galuh Ciamis 1809-1942 (Pemerintahan Sosial, Ekonomi dan Politik)*. Bandung: Universitas Padjajaran.